

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah serta dapat diketahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini, masih jauh dari sempurna namun demikian kami selalu berusaha meningkatkan kesempurnaan laporan ini, maka untuk itu diharapkan ada saran dan kritik demi perbaikan laporan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
- C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

BAB II PERJANJIAN KINERJA

- A. PERENCAAN STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA
- B. PERMASALAHAN/KENDALA
- C. STRATEGI NTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : SDM Menurut Golongan
- Tabel 1.2 : SDM Menurut Golongan
- Tabel 1.3 : SDM Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 1.4 : SDM Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana
- Tabel 2.1 : Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
2013-2018
- Tabel 2.2 : Tujuan/Sasaran Indikator dan Target Kinerja DPMPTSP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
- Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran
- Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 (tiga) Program Utama dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31,707,391,000,00. (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah*) Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 6 (enam) Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6 (enam) Sasaran yang telah ditetapkan adalah 140,14% (sangat baik). Keberhasilan ini disumbangkan oleh 20 indikator kinerja meliputi: 13 (tiga belas) indikator yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik, dan 5 (lima) indikator yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik dan 2 (dua) indikator yang tidak mencapai 100% 20 indikator, dengan rincian sampai dengan Desember 2018 sebanyak 18 indikator (90%) tercapai dan 2 indikator (10%) tidak tercapai.

Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2018 berjumlah Rp. 31.707.391.000,00 terealisasi Rp. 29.628.376.622,00 dengan realisasi fisik **100%** dan realisasi keuangan 93,44%. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

atu Pintu Provinsi Jawa Tengah maka meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan prima serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan.
- d) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pembinaan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
- e) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian;
 - c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan ;
- f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri atas
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:
 - a. Seksi Penanganan Pengaduan;
 - b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan
- h) Bidang Pengelolaan Data dan informasi terdiri atas:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	1	14	52	18	85

Tabel 1.2
SDM Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	SAR- MUD	SAR JANA	S2	S3	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	-	4	19	5	29	27	1	85

Tabel 1.3
SDM Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	45	41	86

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH / VOLUME
1.	Tanah	1 Bidang
2.	Alat-alat besar	3 Unit
3.	Alat-alat angkut	23Unit
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.288 Unit
5.	Alat Komputer	368 unit
6.	Alat Studio dan Komunikasi	94 Unit
7.	Alat Kedokteran dan alat Kesehatan	1 unit
8.	Bangunan Gedung	5 Unit
9.	Bangunan Monumen	1 Unit
10.	Bangunan Air Irigasi	1 Unit
11.	Jaringan	1 Unit
12.	Buku dan Perpustakaan	1.642 Buah
TOTAL		3.428

B. FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dan isu utama kementerian terkait dengan

tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
2. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi;

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Lemahnya penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri;
2. Belum optimalnya publikasi dan promosi penanaman modal dalam menjangkau calon investor potensial;
3. Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM;
4. Terjadinya penyalahgunaan dalam perizinan berusaha;
5. Sering terjadinya perubahan regulasi di bidang perizinan mengakibatkan permasalahan dalam pelayanan;
6. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang belum optimal dalam mendukung percepatan realisasi penanaman modal;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
8. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. **Perencanaan Strategis**

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Oleh karena itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menjadi satu kesatuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013 – 2018, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Visi Gubernur Jawa Tengah

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*.

Misi Gubernur Jawa Tengah

- (1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran;
- (3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
- (4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;

- (5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2. Tujuan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta misi ke-3 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi ke-2: “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”

Tujuan : Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi

Strategi yang dilakukannya itu Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. Dengan Arah Kebijakan Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsive terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

2. Misi ke-3: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”

Tujuan : Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima. Maka strategi yang dilakukan yaitu:

- a. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP.

Dengan arah kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan, dan kepastian serta transparansi proses perizinan.
- b. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota.

3. Sasaran

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 20 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2013-2018 secara lengkap sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1
SASARAN JANGKA MENENGAH DPMPSTP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			Target Akhir
			s.d 2016	2017	2018	
1	Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran.	Meningkatnya jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan usaha menengah kecil	-	70	75	145
		Meningkatnya rasio jumlah izin prinsip terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal.	-	20%	25%	45%
		Meningkatnya rasio perusahaan yang memperluas Penanaman Modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan.	-	10%	20%	20%
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal	Meningkatnya penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP	-	85%	90%	90%
		Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	-	85%	90%	90%
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan	-	100%	100%	100%

		publik				
		Terlayannya permintaan layanan informasi penanaman modal	-	100%	100%	100%
		Terwujudnya system informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial	-	1 paket	1 paket	1 paket
3.	Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal	Bertambahnya izin yang disederhanakan dan penyusunan SOP pelayanan perizinan	-	10 izin	15 izin	15 Izin
		Terbangunnya elektronik service untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi	-	4 paket	6 paket	6 Paket
		Terwujudnya data base penanaman modal	-	1 paket	1 paket	1 Paket
4.	Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya pertumbuhan proyek PMA dan PMDN	-	10%	12%	12%
		Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	-	10%	12%	12%
		Meningkatnya proyek penanaman modal sesuai jadwal	-	20%	25%	25%

		Meningkatnya penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sector	-	80%	90%	90%
		Menurunnya pelanggaran ketentuan penanaman modal	-	10%	5%	5%
		Menurunnya proyek penanaman modal yang gagal	-	30%	20%	20%
5.	Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah	Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Mengengah	-	1 dok	2 dok	2 dok
		Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal	-	4 wil	6 wil	6 wil
		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan		3 sektor	3 sektor	10 sektor
6.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal					

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada pencapaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja pada setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan sinergitas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini yang telah melaksanakan **3 program utama 11 kegiatan dengan didukung oleh APBD Rp. 5.677.109.000,00 (Lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah)**

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2018 secara lengkap tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
DPMPSTP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kepedulian dan minat masyarakat dalam melakukan Penanaman modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran	Jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	70
		Rasio Jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah	20

		kepeminatan Penanaman Modal (%)	
2.	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Pertumbuhan proyek PMA dan PMDN (%)	10
		Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%)	10
		Penyelesaian perizinan (Izin dan non Izin) sesuai SOP (%)	85
3.	Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	85
		Terselesainya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	100
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal	Penyederhanaan perizinan dan penyusunan SOP pelayanan Perizinan	10
		Elektronik Service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realiasi investasi (Paket)	4
		Proyek Penanaman Modal sesuai Jadwal (%)	20
		Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal lintas sektor (%)	80
		Pelanggaran ketentuan Penanaman Modal (%)	10
		Proyek Penanaman Modal yang gagal (%)	30
		Rasio perusahaan yang	10

		memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakuakn pembinaan (%)	
		Terwujudnya database penanaman modal (paket)	1
		Terlayani permintaan layanan informasi publik penanaman modal (%)	100
		Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial (web/Twitter/SMS/dll) paket	1
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan PM yang terintegasi dan terorganisasi baik lintas sektor	Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Menengah (Dokumen)	1
		Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan Penanaman Modal (satuan kawasan/wilayah kab/kota)	4
6.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana apartur untuk mendukung peningkatan daya saing PM	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor/bidang/usaha/tahun)	3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	50 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi 6 sasaran strategis, yaitu : (1) Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran, (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal, (3) Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal, (4) Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan, (5) Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah, (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

NO	Indikator Kerja	Sat	Real Th. 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
				Target	Real	% Capaian		
1.	Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil		174	75	90	120,00	145	182,07
2.	Rasio Jumlah Ijin Prinsip dan terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal (%)		34,29	25	46,60	186,40	45	159,16
3.	Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)		14,02	12	54,92	457,67	12	457,67
4.	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN		34,98	12	15	125,00	12	125,00
5.	Penyelesaian Izin dan Non Perizinan sesuai SOP (%)		99,95	90	96,9	107,67	90	107,67
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)		87,64	90	84,65	94,06	90	94,29
7.	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)		89,55	100	100	100,00	100	100,00
8.	Penyederhanaan Perijinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan (Unit Jenis/Non Ijin)		14	15	53	353,33	15	446,67
9.	Elektronik service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perijinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi investasi (paket)		4	6	6	100,00	6	100,00
10.	% Proyek penanaman modal sesuai jadwal		27,86	25	25,6	102,40	25	105,72
11.	%Penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor		88,24	90	100	111,11	90	102,88
12.	% pelanggaran ketentuan		1,57	5	4,71	106,16	5	140,45

	penanaman modal							
13.	Proyek penanaman yang gagal		1,14	20	0,99	202,20	20	1904,76
14.	Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan		10,71	20	7,35	36,75	20	43,40
15.	Database penanaman modal yang terbangun (paket)		1	1	1	100	1	100,00
16.	Terlayani permintaan layanan informasi publik penanaman modal (%)		100	100	100	100	100	100,00
17.	Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial (web/twitter/sms/dll)(paket)		1	1	1	100	1	100,00
18.	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang/ usaha/ tahun)		8	3	3	100	10	110,00
19.	Tersedianya rencana umum penanaman modal tahunan dan jangka menengah (dokumen)		1	2	2	100	2	150,00
20.	Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal (satuan kawasan/wilayah kab/kota)		4	6	6	100	6	166,67
TOTAL							231,04	239,82

Dalam melaksanakan urusan penanaman modal dilakukan melalui 3 program, yaitu: (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; serta (3) Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Indikator kinerja program yang mendukung urusan Penanaman Modal sebanyak 20 indikator, dengan rincian sampai dengan Desember 2018 sebanyak 18 indikator (90%) tercapai dan 2 indikator (10%) tidak tercapai.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, memiliki 2 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target, yaitu: (1) Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil terealisasi sebanyak 90 kemitraan, melebihi target 75 kemitraan walaupun lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu 174 kemitraan; dan (2) Rasio Jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 46,6%, melebihi target 25% dan juga lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yaitu 34,29%. Tingginya tingkat realisasi kedua indikator terhadap target disebabkan

antara lain karena telah dibentuknya Tim Percepatan dalam pencapaian realisasi hasil Kepeminatan Investasi maupun Kemitraan Usaha yang telah bekerja dengan efektif dan adanya koordinasi intensif dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian realisasi hasil Kepeminatan Investasi maupun Kemitraan Usaha.

Dampak positif dari pelaksanaan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yaitu dikenalnya potensi dan peluang investasi Jawa Tengah di luar Provinsi Jawa Tengah dan di luar negeri.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, memiliki 16 indikator kinerja program, dengan realisasi sebanyak 14 indikator kinerja mencapai target, 2 indikator kinerja belum mencapai target.

Indikator kinerja program yang mencapai target antara lain: (1) Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN dengan realisasi 54,92% melebihi dari target 12%, dengan tingkat capaian sebesar 457,67%; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN realisasi 15%, melebihi target 12% dengan tingkat capaian sebesar 125%. Tingkat capaian indikator pertama yang melebihi target disebabkan karena diimplementasikannya sistem OSS yang mewajibkan semua perusahaan mendaftarkan diri tanpa ada batasan nilai investasi dan adanya kesempatan berinvestasi di bidang usaha baru. Tingginya tingkat capaian indikator kedua disebabkan telah dilakukan berbagai upaya percepatan, antara lain dengan membentuk Tim Percepatan Realisasi Investasi dan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sehingga calon investor merasa nyaman berinvestasi di Jawa Tengah; Penyelesaian Izin dan Non Perizinan sesuai SOP dengan realisasi 96,9%, melebihi target 90%; terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan realisasi 100% sesuai target dan melebihi capaian tahun sebelumnya 89,55%; Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan (Unit /Jenis Izin/Non Izin) capaian sebesar 353,33% dengan realisasi 53 perizinan yang disederhanakan, melebihi dari target 15 perizinan yang disederhanakan. Tingginya tingkat realisasi terbantu karena adanya penyederhanaan perizinan (penggabungan dan penghapusan izin) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Indikator kinerja program yang tidak mencapai target yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang terealisasi hanya 84,65%, kurang dari target 90% yang disebabkan karena Permohonan izin melalui Online Single Submission (OSS) yang mulai diberlakukan pada bulan Juli 2018, berdasarkan amanat PP 24 Tahun 2018, masih terdapat banyak kendala dalam pengimplementasiannya sehingga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat; Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan dengan realisasi hanya 7,35% kurang dari target 20%, hal ini dikarenakan adanya peluang investasi yang lebih menguntungkan di

bidang usaha lain sehingga perusahaan tidak melakukan perluasan penanaman modal di bidang usaha yang sama, dibuktikan dengan adanya pertumbuhan proyek PMA & PMDN sebesar 54.92%.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah, memiliki 3 indikator kinerja program, seluruhnya belum mencapai target, yaitu: (1) Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan dengan realisasi 3 bidang usaha sesuai target; (2) Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal tahunan dan jangka menengah dengan realisasi 2 dokumen sesuai target; dan (3) Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal untuk 6 kawasan/wilayah kabupaten/kota sesuai target.

Penghargaan yang diterima oleh Jawa Tengah selama tahun 2018 yaitu mendapatkan "Investment Award" dari BKPM RI sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Terbaik Pertama di Indonesia dan sebagai Top 10 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dengan Inovasi SIAP INDEKOST (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Izin Penelitian dari Kamar Kost).

Program pendukung sasaran strategis antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Lemahnya penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri;
2. Belum optimalnya publikasi dan promosi penanaman modal dalam menjangkau calon investor potensial;
3. Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM;
4. Terjadinya penyalahgunaan dalam perizinan berusaha;
5. Sering terjadinya perubahan regulasi di bidang perizinan mengakibatkan permasalahan dalam pelayanan;
6. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang belum optimal dalam mendukung percepatan realisasi penanaman modal;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
8. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Perlunya identifikasi potensi penanaman modal yang prospektif di kabupaten dan kota se Jawa Tengah;
2. Perlunya mengetahui target pasar meliputi sektor, skala, dan daerah tujuan promosi penanaman modal serta penggunaan teknologi informasi;
3. Penyiapan Usaha Kecil Menengah dalam memenuhi permintaan/kebutuhan persyaratan kemitraan dari Usaha Menengah Besar (PMA/PMDN) serta monitoring dalam pelaksanaannya;

4. Perlunya pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan berusaha;
5. Perlunya koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam penetapan suatu peraturan;
6. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan penyelenggaraan klinik investasi yang lebih sering dan peningkatan kesadaran pengusaha untuk memenuhi ketentuan penanaman modal;
7. Perlunya pengembangan dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi guna percepatan pelaksanaan berusaha dan pencatatan realisasi penanaman modal;

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, didukung dengan anggaran Rp. 31,707,391,000,00. (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp 18.776.200.000,00
2. Belanja Langsung : Rp 12.931.191.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam rangka mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.080.200.000	3.615.276.635	88.60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.279.020.000	4.451.169.154	84.32
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	7.355.190	73.55
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	272.500.000	251.754.209	92.39
5	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	859.750.000	857.309.650	99.72

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	5.926.940.000	5.729.832.621	96.67
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.347.790.000	2.245.175.229	95.63
TOTAL	18.776.200.000	17.157.872.688	91.39

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018 (belanja langsung dan belanja tidak langsung) terjadi efisiensi sebesar Rp. 2.079.014.378,00 (6,56%)

BAB V

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dengan memperhatikan capaian indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan katagori **sangat baik**. Hal ini didukung oleh data dari total pencapaian total persentase target sasaran yaitu sebesar 140,14% (sangat baik).

B. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 antara lain:

1. Lemahnya penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri;
2. Belum optimalnya publikasi dan promosi penanaman modal dalam menjangkau calon investor potensial;
3. Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM;
4. Terjadinya penyalahgunaan dalam perizinan berusaha;
5. Sering terjadinya perubahan regulasi di bidang perizinan mengakibatkan permasalahan dalam pelayanan;
6. Pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang belum optimal dalam mendukung percepatan realisasi penanaman modal;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
8. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan.

C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Perlunya identifikasi potensi penanaman modal yang prospektif di kabupaten dan kota se Jawa Tengah;
2. Perlunya mengetahui target pasar meliputi sektor, skala, dan daerah

- tujuan promosi penanaman modal serta penggunaan teknologi informasi;
3. Penyiapan Usaha Kecil Menengah dalam memenuhi permintaan/kebutuhan persyaratan kemitraan dari Usaha Menengah Besar (PMA/PMDN) serta monitoring dalam pelaksanaannya;
 4. Perlunya pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan berusaha;
 5. Perlunya koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam penetapan suatu peraturan;
 6. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan penyelenggaraan klinik investasi yang lebih sering dan peningkatan kesadaran pengusaha untuk memenuhi ketentuan penanaman modal;
 7. Perlunya pengembangan dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi guna percepatan pelaksanaan berusaha dan pencatatan realisasi penanaman modal;

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan atau kinerja yang akan datang.